

Etika Politik

By Ari Darmastuti

WORD COUNT

3251

TIME SUBMITTED

12-FEB-2020 01:30PM

PAPER ID

55222218

**ETIKA POLITIK : TEORI DAN PRAKTEK
DALAM MASYARAKAT INDONESIA
ARI DARMASTUTI
ABSTRAK**

redum tiasa Dalam kerangka ³ Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, bahwa ia telah meletakkan daerah, terutama kabupaten / kota, dalam posisi yang sangat kuat. Sehingga menimbulkan kesan munculnya raja-raja kecil di daerah, dan tidak hanya eksklusif, tapi legeslatif pun, baik pada level nasional maupun lokal, memperoleh penguatan politik yang luar biasa. Agar tidak terjadi penyalahgunaan hak-hak dan kewajiban penguasa, baik di pusat maupun di daerah, maka etika politik yang berupa nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakkan dalam sebuah negara yang baik perlu mendapat perhatian semua pihak.

Kata Kunci: Etika, Politik, Otonomi Daerah (Otda), Pemerintahan, Legislatif, Eksekutif, Reformasi

A. Pendahuluan

Tanpa terasa, orde reformasi sudah berjalan enam tahun inq lebih, yaitu sejak terbenamnya orde baru 1998, namun kondisi yang diinginkan oleh masyarakat bangsa Indonesia dengan gerakan reformasi, yaitu merdekanya masing-masing mereka baik secara individu maupun kelompok untuk berekspresi dan menyalurkan aspirasi mereka, serta memberi makna bagi reformasi. Kekuasaan dan negara menjadi sederhana; sebagai penegak moral, kode etik, dan keberlangsungan proses demokratisasi.

Mencermati perjalanan reformasi maka sorotan ditujukan kepada visi reformasi itu sendiri, yaitu penghapusan KKN, penghapusan dwifungsi TNI/Polri, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan seluruh kroninya. penegakan supremasi hukum. pembedaan otonomi daerah seluas-luasnya, amandemen konstitusi, reformasi pendidikan, menolak militerisasi warga sipil, dan pemulihan ekonomi. Ke arah visi reformasi itulah etika politik going on.

B. Reformasi dan Norma Etika Proses reformasi di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan penting dalam kehidupan politik, baik dalam skala nasional maupun lokal. Perubahan yang ¹ dimaksud di sini adalah perubahan positif mengikuti arah reformasi tersebut, yaitu dari keadaan yang tidak dan atau kurang baik kepada kondisi atau keadaan yang lebih baik. Beberapa perubahan positif yang patut dicatat adalah :

1. Terjadi penguatan yang signifikan atas supstruktur politik di daerah. Eksekutif dan legislatif di daerah mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar vis-à-vis suprastruktur politik nasional jika dibandingkan dengan Orde Baru. Meski suprastruktur politik nasional masih mempunyai ³ peran yang sangat dominan dalam keseluruhan kehidupan politik, tetapi kerangka Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah telah meletakkan daerah, terutama kabupaten/kota, dalam posisi yang sangat kuat. Hal ini selanjutnya menyebabkan terjadinya eksplosif peran politik eksekutif dan legislatif di daerah. Jika pada masa Orde Baru daerah dapat dikatakan sekedar menjadi "stempel"

keinginan politik pusat, maka hal ini telah berubah sangat drastis pada masa reformasi, Pusat seakan-akan telah kehilangan daya tekan dan kewibawaan atas daerah.

2. Legislatif, baik pada level nasional maupun lokal, mengalami penguatan politik yang luar biasa. Pada masa reformasi, legislatif di daerah bahkan telah menjadi lembaga yang setingkat lebih tinggi dibanding eksekutif, karena kepala eksekutif dipilih dan harus bertanggung jawab kepada legislatif daerah. Oleh karena itu sistem pemerintahan di daerah telah menjadi parlementarian murni. Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 tersebut di muka, maka pertama, legislatif yang selama Orde Baru merupakan bagian dari pemerintah, tidak lagi menjadi bagian pemerintah. Adanya ketentuan Undang-Undang yang memberi hak memilih kepala daerah kepada Dewan Perwakilan rakyat daerah. Kedudukan keuangan DPRD yang terpisah dari kedudukan keuangan pemerintah takut diintervensi oleh eksekutif dalam berbagai kebijakannya menyebabkan DPRD dapat menyusun anggaran tanpa perlu takut diintervensi oleh eksekutif dalam berbagai kebijakannya.

Namun demikian, di sini juga patut dicatat berbagai masalah terkait dengan proses reformasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah :

1. Reformasi politik berhenti di tingkat formal lembaga di mana rakyat tidak diberi peluang untuk ikut serta dalam pembuatan berbagai keputusan politik dan pemerintahan. Proses konsultasi publik untuk menjangkau aspirasi publik tidak dicantumkan sebagai kewajiban yang harus dilalui sebelum suatu kebijakan disusun dan ditetapkan.
2. Proses reformasi telah menghasilkan avonturur-avonturir politik berupa anggota DPR/DPRD yang muncul serta mendadak dalam posisi-posisi politik penting tanpa didasari pemahaman yang memadai atas norma hukum dan etika berpolitik.
3. Pemain-pemain politik lama yang sudah cukup berpengalaman serta memahami aturan dan etika politik tidak berani tampil, dan justru terkesan memanfaatkan situasi untuk kepentingan kelompok dan pribadi. Adalah tidak mungkin para politisi senior tidak memahami bahwa berbagai produk DPRD telah dibuat dengan melanggar aturan, seperti anggaran yang bertentangan atau tidak memenuhi aturan di atasnya.
4. Terjadinya "pemerasan politik" berupa pemanjangan finansial kepada DPRD berhubung posisi DPRD yang sangat kuat, termasuk terjadinya aktifitas "money politics" dalam berbagai pemilihan kepala daerah di Indonesia.

Secara singkat, masalah politik terbesar pada masa reformasi adalah adanya jurang yang sangat dalam antara harapan rakyat sewaktu mendukung reformasi politik, yaitu harapan akan mendapatkan pemerintahan yang mengabdikan kepada kepentingan rakyat, dengan kenyataan bahwa suprastruktur politik yang melaksanakan proses politik tidak mengindahkan norma etika berpolitik yang baik. Dengan melihat kenyataan yang demikian, maka tidak terlalu keliru jika ada sementara orang menilai bahwa reformasi yang diharapkan dapat membawa perubahan tersebut ternyata gagal total, karena dari sembilan visi reformasi yang dicanangkan, ternyata belum ada yang menunjukkan hasil yang signifikan. Penghapusan KKN, ternyata justru semakin menggurita dan mewabah bahkan menjadi-jadi, penghapusan dwifungsi TNI/Polri, secara konseptual memang sudah dilakukan, namun arogansi dan tindakan repressif mereka masih terjadi di mana-mana, pengadilan terhadap mantan Presiden Soeharto dan kroni-kroninya, juga belum memperlihatkan hasil yang

signifikan, penegakan supremasi hukum, masih jauh panggang dari api, kalau hal yang satu ini sudah berjalan maka etika politik sudah mencapai titik zenitnya; pemberian otonomi daerah yang seluas-luasnya, ternyata pemerintah pusat masih mendua hati, masih setengah-setengah, pemulihan ekonomi, juga ternyata justru semakin terpuruk, rakyat makin tidak berdaya, reformasi pendidikan, hal ini "justru semakin gila", SPP semakin tidak terjangkau, biaya pendidikan sangat tinggi, harga buku membumbung tinggi, kesejahteraan guru dan dosen semakin diabaikan.

- C. Etika Politik Masyarakat Bangsa Indonesia Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Inggris *ethics* yang berarti studi tentang moral. Dalam bahasa sehari-hari, etika diartikan sebagai kaidah-kaidah moral. Kaidah-kaidah moral yang terformulasikan dalam etika adalah serangkaian nilai-nilai yang dianggap mempunyai nilai keluhuran untuk dijadikan pedoman sikap dan prilaku. Setiap masyarakat dan bangsa mempunyai nilai. Fenomena krisis etika dalam politik ini, tidak hanya melanda atau dialami oleh bangsa Indonesia, karena problema yang dihadapi proses peradaban bangsa-bangsa di dunia dewasa ini adalah problema etik, yakni rendahnya apresiasi terhadap etika peradaban. Sebagai bukti keperinatinan áuma secara global, maka pada tahun 1993, Parliament of the World's Religions, yang berlangsung di Chicago Amerika Serikat dideklarasikan sebagai *Global Ethic*. Asumsi dasar dari Deklarasi Etika Global tersebut, menurut M. Sansuddin, adalah bahwa dunia manusia sedang mengalami suatu krisis mendasar, yaitu krisis dalam ekonomi global, ekologi global, dan politik global. Pangkal dari segala krisis adalah krisis kemanusiaan, yakni krisis etika. Lihat, M. Din Syamsuddin, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madani*, (Jakarta Logos, 2000), h. 207-208. Karena etika itu membahas masalah sikap dan prilaku, maka sesungguhnya etika itu adalah merupakan salah satu cabang dari ilmu pengetahuan, dan ia tidak lebih sebagai bagian dari psikologi dan sosiologi. Etika sebagai bagian dari psikologi karena menyangkut soal motif dan rasa dari prilaku, sedangkan sebagai bagian dari sosiologi karena ia menyangkut sikap hidup dalam prilaku sosial, termasuk prilaku politik. "Emotivism in Ethics" dalam Albury Castell, *An Introduction to Modern Philosophy*, (New York, Macmillan Publishing co., inc. 1976), h. 262

Etika yang akan dijadikan pedoman sikap dan perilaku masyarakat dan bangsa yang bersangkutan. Nilai-nilai itu melekat erat pada kultur dan sejarah, karena itu di dunia saat ini berkembang dua sistem nilai Barat dan non-Barat,

Karena sifatnya yang relatif terhadap variabilitas waktu, tempat dan budaya, maka etika suatu masyarakat dan bangsa akan berbeda dari nilai etik masyarakat dan bangsa yang lainnya. Sebuah masyarakat bangsa yang berlandaskan ideologi individualis, misalnya, akan sosialis. Hal ini disebabkan masyarakat individualis-liberalis meletakkan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi yang harus dijunjung, dilindungi dan dihargai dalam masyarakat, sementara masyarakat sosialis menghendaki bahwa karena tidak ada manusia yang mempunyai makna sebagai manusia ketika dia sendirian, maka kebaikan bagi kelompok dan masyarakat adalah nilai yang harus dilindungi, diupayakan dan diletakkan pada tempat tertinggi.

Etika suatu masyarakat tumbuh bersamaan dengan proses pertumbuhan masyarakat bangsa yang bersangkutan. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat berasal dari tradisi masyarakat yang bersangkutan maupun akibat persentuhannya dengan masyarakat bangsa lainnya. Bagi bangsa Indonesia sendiri, nilai etikanya dipengaruhi dan bersumber dari tradisi suku-suku bangsa Indonesia dan dari persinggungannya dengan masyarakat bangsa

lainnya, baik dari zaman penjajahan maupun periode sesudahnya. Sebagai akibatnya nilai etika bangsa Indonesia bersumber dan dipengaruhi tradisi komunalisme masyarakat-masyarakat Timur, demokrasi individualisme masyarakat Barat, religiusitas Islam, tradisionalisme dan sinkritisme Jawa. Pengaruh-pengaruh tersebut sangat sukar saat ini untuk diurai satu persatu. Namun secara teoritis nilai etika itu dapat dipetakan sebagai nilai etika campuran antara unsur-unsur tradisi tersebut, yaitu Islam, budaya Nasional, dan budaya Barat. "Untuk kasus Indonesia, etika politik berasal dari berbagai sumber nilai, yaitu nilai-nilai budaya Jawa umpamanya, Nilai-nilai religius agama dan lain sebagainya, pembagian kepada dua sistem nilai ini, mengutip Hassan Hanafi ketika presentasi pada Konferensi Internasional tentang Krisis Nilai di Tsukuba- Jepang, 1982. Liai, Hassan Hanafi, Agawa, Kekerasan & Iskam Koniemporer. (Yogyakarta: Jendela, 2001), h. 107.

Secara umum, etika politik masyarakat bangsa Indonesia juga berasal dan dipengaruhi unsur-unsur tersebut. Dan sebagai mana disebutkan demikian, maka etika politik bangsa Indonesia merupakan campuran dari berbagai etika politik yang berasal dari berbagai pengaruh pemikiran politik dari Barat, Islam, dan tradisionalisme-sinkretisme Jawa. Unsur pertama yang dominan adalah etika politik yang berasal dari para pemikir politik kuno yang sampai sekarang pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu dan dunia politik masih dominan, antara lain Plato dan Aristotele. Meski mengemukakan argumentasi yang berbeda dalam pemikiran politik mereka, keduanya mempunyai kesamaan dalam memandang nilai-nilai utama dalam kehidupan politik yang harus ditegakkan dalam sebuah negara yang baik.

D. Nilai-Nilai Utama dalam Etika Politik

1. Nilai Keadilan

Dalam dunia politik yang menyangkut hubungan antara pemerintah dan yang diperintah. Setiap masyarakat, terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pemimpin (penguasa pejabat birokrasi) dan yang dipimpin. Untuk menstudi kepemimpinan struktural birokrasi politik berarti memahami struktur, proses dan perilaku politik pemimpin terutama etika politiknya, apakah ia berlaku adil atau tidak. Secara khusus keadilan diartikan sebagai membenarkan apa yang menjadi hak. Dimensi keadilan yang utama adalah keseimbangan antara hak dan wajib. Hak bagi warga negara adalah mendapatkan kebutuhan (akan kerja dan kesejahteraan) dan kewajibannya adalah tunduk kepada penguasa. Hak penguasa apa pun namanya) adalah mendapat ketertundukan warga negara. "Secara etimologi, istilah politik berarti kebijakan (policy), kekuasaan (power), atau strategi. Kata bijak memiliki pengertian faham, arif dan bijaksana. Secara terminologi, kebijakan politik bisa diartikan sebagai suatu sikap yang arif dan bijaksana dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan umum. Lihat, Maunce Duveger, Sosiologi Politik, terj. Daniel Dhakidae (Jakarta: Rajawali Press, 1992), h. 7. Dengan demikian, etika politik itu dapat diartikan sebagai sikap politik yang bijaksana berdasarkan nilai-nilai kebaikan dalam berpolitik, seperti nilai keadilan, kejujuran, amanah dan lain sebagainya. "R. Eep Suciullah Fatah, Adalah dan Praxpek Demokrasi di Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), h. 34.

tetapi kewajibannya adalah memenuhi hak warganegara, Asumsinya adalah, politik yang beretika berjalan atas prinsip pemenuhan timbal balik hak dan kewajiban ini. Lebih lanjut, jika keadilan tercapai, maka akan tercapai juga kebahagiaan berupa terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan warganegara. Oleh karena itu, kalau salah satu unsur tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka etika politik terganggu.

2. Nilai Kejujuran

Kejujuran menjadi pangkal hidup yang baik karena kejujuran mencegah perilaku menyimpang. Kejujuran harus menjadi pedoman perilaku baik yang memerintah maupun yang diperintah untuk menuju hidup yang baik. Tanpa kejujuran, maka proses politik tidak akan menghasilkan pemecahan masalah yang sesungguhnya karena terdapatnya masalah-masalah yang tetap tersembunyi dan motif-motif yang juga tersembunyi. Kehidupan politik yang baik harus didasarkan atas kejujuran semua pihak. Dalam terminologi Islam, kata jujur ini adaiah shiddiq, yaitu saiah satu sifat Nabi Muhammad SAW.

3. Nilai Kesederhanaan

Kesederhanaan juga pernah menjadi etika yang dianut oleh salah satu cabang pemikiran filsafat politik, sedemikian kuatnya sehingga penganutnya menolak segala hal yang berhubungan dengan kenikmatan hidup. Kesederhanaan atau modesry tidak berarti kemelaratan atau hidup melarat, tetapi hidup sesuai dengan hasil kerja yang diperoleh dari usaha yang dilakukan. Pemikiran politik Plato bahkan mengandung sebuah aspek yang mengharuskan para pemimpin untuk hidup dalam sebuah asr⁴na, makan dengan cara yang sama agar mereka tidak hidup secara berlebihan. Siddiq yaitu selalu bersikap benar, jujur dan dapat dipercaya (Q.S 19:41,50,56).

Nilai-nilai etika ini dapat ditemukan dalam tulisan-tulisan para pemikir politik kuno selain konsepsi mereka tentang negara yang baik dan warganegara yang baik, Namun nilai-nilai etika tersebut bukan monopoli para pemikir politik tersebut saja. Nilai-nilai tersebut juga dapat ditemukan dalam ajaran berbagai agama termasuk agama Islam yang mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Pengaruh terbesar dari filsafat Islam terhadap etika politik di Indonesia adalah bahwa kekuasaan bukanlah semata-mata berasal dari hubungan-hubungan peristiwa politik (seperti pemikiran yang berasal dari teori-teori politik di negara Barat), tetapi kekuasaan adalah amanat Allah swt Karena sifatnya yang divine atau suci, maka kekuasaan harus dijalankan atas dasar ajaran-ajaran agama dan nantinya juga harus dipertanggungjawabkan kepada Allah swt. Meski secara formal ajaran Islam tidak dijadikan dasar negara, tetapi pemikiran ini begitu kuat pengaruhnya terhadap tata nilai etika politik di negara Republik Indonesia.

E. Nilai-Nilai Etika Politik Good Governance

Berbagai nilai etika yang disebutkan dalam beberapa paragraf terdahulu berasal dari pemikiran politik klasik. Pada saat ini nilai-nilai etika tersebut sudah banyak berkembang. Beberapa nilai baru yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari nilai-nilai dasar tersebut antara lain adalah prinsip good governance. Good governance merupakan serangkaian nilai yang harus dijadikan pedoman dalam mengelola sebuah kehidupan politik. Beberapa prinsip terpenting mengenai good governance yang harus diwujudkan antara lain adalah : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

1. Transparansi

Transparansi adalah prinsip bahwa karena pemerintah berasal dari, dikelola oleh dan dilakukan untuk kepentingan rakyat, maka semua mekanisme pemerintahan harus dapat diketahui dan diakses oleh semua warganegara. Menurut istilah Mussolini dan Hitler, pemimpin itu adalah simbol rakyat dan perjuangan mereka. Oleh karena itu seorang pemimpin harus tahu betul posisi yang diembannya mereka dan karenanya harus menjaga diri dari sifat-sifat tercela. ¹Kedua tokoh ini (Mussolini dan Hitler) menegaskan bahwa hanya pemimpin besarlah yang dapat memahami dan meng-artikulasikan keheulakan sejati para pengikutnya oleh karena itu ia harus cerdas, jujur dan amanah

Tidak transparan dalam memerintah termasuk perbuatan tercela. Kecuali dokumen-dokumen yang secara sah merupakan dokumen rahasia, maka tidak boleh ada sebuah pun mekanisme dan produk politik dan pemerintah yang tersembunyi dari kontrol publik. Publik berhak mengetahui apa pun yang terjadi dalam proses politik dan pemerintahan.

2. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu prinsip etis yang mengharuskan bahwa proses politik dan pemerintahan dilaksanakan dengan memberi kesempatan partisipasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi publik untuk sebuah demokrasi secara formalistik adalah melalui pemilihan umum. "Pemilihan umum dalam konteks suksesi kepemimpinan merupakan peristiwa alami, karena secara natural, setiap manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan hidup, ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan politik." "Di samping itu pula, meskipun ada DPR dan DPRD, tetapi sifat manusia yang terbatas, cenderung kepada materialisme yang mendorong untuk melakukan korupsi dana publik, mengharuskan kelemahan tersebut diatasi dengan melibatkan sebanyak mungkin partisipasi publik dalam setiap pengambilan kebijakan dan keputusan politik dan pemerintahan,

Untuk mencapai mereka yang berhasil naik ke puncak kekuasaan itu No fakio adalah kelompok elit. Lihat, Ian Adams, *Ekologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik ke Masa depannya*, (Yogyakarta Qalam, 2004), h. 310

"Jeff Haynes, *Demokrasi Masyarakat Sipil di Durua Keng Gerak Politik Baru Kaum erpinggir*". (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2000), h. 138.

"Lihat, Ismail Madjid, "The Islamic Concept of Man and Its Implications for the Muslims' Appreciation of the Civil and political Rights" dalam *Al-Jami'ah*, No. 65VI 2000, (Yogyakarta : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kulijaga, 2000), b. 40.

3. Akuntabilitas

Akuntabilitas mengandung arti bahwa setiap sikap dan tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Pada umumnya akuntabilitas dikaitkan dengan penggunaan dana publik meskipun akuntabilitas juga diterapkan untuk aktifitas lain yang tidak berhubungan dengan anggaran, prinsip akuntabilitas, maka audit independen dalam semua harus dijamin, Dasar asumsinya adalah karena pemerintah dibiayai dari dana publik dan dilakukan atas dukungan publik, maka setiap sen pengeluaran anggaran atau setiap tindakan yang diambil harus dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Prinsip akuntabilitas ini, dalam terminologi Islam adalah amanah. "Amanah, yaatu selalu bersikap tanggungjawab dan tidak pernah menepati janji dan suka berkhianat. (Q.S. 26 :107. 28: 26).

F. Etika Politik dalam Realitas Empiris

Secara teoritis, prinsip-prinsip etika politik di atas, semestinya diwujudkan dalam kehidupan politik masyarakat bangsa Indonesia. Namun pada prakteknya diketahui bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut masih sangat jauh dari ideal. Bahkan diketahui pula bahwa prinsip dasar keadilan, seperti yang telah disinggung di muka, masih belum terwujud sama sekali. Masyarakat masih dibebani terlalu banyak kewajiban dibanding dengan hak mereka untuk mendapat pelayanan dan kesejahteraan. Padahal prinsip inilah yang mengikat warganegara dengan negaranya. Sebuah pemerintahan yang tidak memberi kesejahteraan kepada masyarakatnya, secara etis tidak pantas untuk didukung

Lebih lanjut, kejujuran juga masih menjadi barang langka. Berbagai laporan media massa "menelanjangi" bagaimana pernyataan para pejabat publik dan politik tidak mengandung kejujuran ketika mereka mengatakan tidak terjadi proses money politics korupsi di lingkungan kerja masing-masing. Sebagai akibatnya proses politik dan pemerintahan menjadi proses formal semata dan tidak menjadi proses penyelesaian berbagai masalah masyarakat. Sekali lagi, sebuah pemerintahan yang tidak jujur menjadi tidak atau paling tidak berkurang legitimasinya untuk memerintah. Dengan demikian, para pimpinan (pejabat) yang tidak populer karena tidak jujur dapat tereliminasi.

Kesederhanaan, juga tidak dicerminkan dalam perilaku lembaga politik dan pemerintahan. Penggunaan dana publik secara boros bahkan dengan cara pembelanjaan dana publik yang melanggar aturan menjadi trend berbagai tingkat pemerintahan saat ini. Berbagai pengeluaran anggaran untuk kepentingan eksekutif dan legislatif yang tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak dan pos-pos pengeluaran yang melanggar aturan telah disorot berbagai kalangan, tetapi berbagai sorotan tersebut tidak mendapat perhatian yang memadai.

Transparansi, partisipasi dan akuntabilitas juga masih sangat jauh dari kenyataan. Ketika masyarakat dan berbagai elemen lain seperti ormas dan ornop diperlakukan sebagai musuh dan bukan partner eksekutif dan legislatif, maka ketiga prinsip ini tidak mungkin akan terwujud.

G. Penutup

Etika politik yang tercermin dalam nilai-nilai luhur, bukanlah sesuatu yang tidak dapat diwujudkan. Perbedaan sebuah rejim dengan rejim lainnya bukanlah terletak pada kemampuannya untuk secara sempurna mewujudkan etika politik dalam kehidupan nyata, tetapi terletak pada niat yang tulus dan upaya yang sungguh-sungguh untuk mewujudkannya. Nilai etika politik tidak mungkin diwujudkan secara sempurna karena dia akan terus berkembang bersama waktu. Tetapi betapa pun sulitnya mewujudkan

nilai tersebut, dia tetap harus menjadi pedoman agar hidup manusia menjadi berarti, agar pemerintahan mempunyai manfaat untuk warganya.

Jatuhnya rejim orde baru Mei 1998. merupakan momentum politik paling signifikan yang menandai munculnya era baru, yaitu era reformasi, sesuai dengan maknanya, baik secara etimologi maupun terminologi, reformasi merupakan jembatan menuju suatu perubahan, yang tanpa dilandasi komitmen yang kuat, yang bernama etika politik, maka perjuangan reformasi akan menjadi sebuah perjuangan yang sia-sia, oleh karena itu, etika politik, dengan nada menyindir, menyuarakan bahwa untuk membersihkan pekarangan rumah yang kotor haruslah menggunakan sapu yang bersih, artinya perjalanan reformasi akan lancar manakala para pemimpin yang duduk di pemerintahan (eksekutif, di legislatif ataupun di semua sektor publik hendaklah komitmen dengan penuh kesadaran serta penghayatan yang mendalam bahwa menegakkan etika politik merupakan fardu 'ain, kewajiban individu yang tidak bisa ditawar-tawar lagi pelaksanaannya.

Adams, Ian, *Ideologi Politik Mutakhir, Konsep, Ragam, Kritik dan Masa depannya*, Yogyakarta : Qalam, 2004.

Ayer, A.J., "Emotivism in Ethics" dalam Alburey Casteli, *An to Modern Pholosophy*, New York, Introduction Macmillan Publishing co., inc. 1976.

Duveger, Maurice, *Sosiologi Politik*, terj. Daniel Dhakidae, Jakarta :Rajawali Press, 1992.

Fatah, R. Eep Saefullah, *Masalah dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.

Sanafi, Hassan, *Agama, Kekerasan & Islam Kontemporer*, Yogyakarta : Jendela, 2001.

Haynes, Jeff, *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Dunia Ketiga* "Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir", Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 2000.

Madjid, Nurcholish, "The Islamic Concept of Ma' and Its Implications for the Muslims' Appreciation of the Civil and political Rights" dalam Al-Jami 'ah, No. 65. VI 2000, Yogyakarta : State Institute of Islamic Studies (IAIN) Sunan Kalijaga, 2000.

Syamsuddin, M. Din, *Etika Agama dalam Membangun Masyarakat Madant*, (Jakarta : Logos, 2000).

Etika Politik

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.radenintan.ac.id Internet	76 words — 2%
2	rifada.blogspot.com Internet	36 words — 1%
3	issuu.com Internet	22 words — 1%
4	ejournal.radenintan.ac.id Internet	16 words — < 1%
5	marjuki001.blogspot.com Internet	15 words — < 1%
6	pt.slideshare.net Internet	14 words — < 1%
7	jurnalfsh.uinsby.ac.id Internet	11 words — < 1%
8	Robby Habiba Abror. "Paradoks universalitas HAM Barat di muka cermin Islam perspektif filsafat hukum dan HAM", Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2012 Crossref	9 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES ON

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

